



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 124/180/2024
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PROGRAM
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Program Penyusunan yang selanjutnya disebut Progsun.
 2. Undang-Undang yang selanjutnya disingkat UU.
 3. Peraturan Pemerintah yang selanjutnya disingkat PP.
 4. Peraturan Presiden yang selanjutnya disingkat Perpres.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya Permendagri.
 6. Peraturan Menteri Perhubungan yang selanjutnya disebut Permenhub.
 7. Peraturan Menteri Kesehatan yang selanjutnya disebut Permenkes.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Permendikbud.
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut PermenpanRB.
 10. Peraturan Wali Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Perwako.
 11. Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Ranperwako.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat APBD.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa.
 15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD.
 16. Target Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs.
 17. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM.
 18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPRD.
 19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMD.
 20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
 21. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

22. Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinkes.
23. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Diskominfo.
24. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinas PerkimLH.
25. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPUPRP.
26. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD.
27. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD.
28. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD.
29. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas.
30. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN.

KEDUA : Daftar Ranperwako untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 124/180/2024
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

DAFTAR PENYUSUNAN RANPERWAKO TAHUN 2024

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
1.	Standar Biaya Masukan Desa Tahun Anggaran 2024	DPMD	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Dasar Hukum: Permendagri 20 Tahun 2018	Penyusunan APB Desa Tahun 2025 dan standar harga satuan	Tersusunnya Peraturan Desa tentang APB Desa Februari 2024
2.	Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024	DPMD	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Dasar Hukum: Permendagri 20 Tahun 2018	Besaran dan Metode Penyaluran ADD Tahun 2024	Pendapatan pada APB Desa tahun 2024 dan tata cara penyaluran Februari 2024
3.	Standar Harga Satuan	BPKPD	Kebutuhan dalam penyusunan APBD. Dasar Hukum: a. PP 12 Tahun 2020 b. Perpes 53 Tahun 2023	Besaran belanja jasa	Pemerintah Kota Pariaman Februari 2024
4.	Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	BPKPD	Penyesuaian kegiatan dan Pembayaran Kewajiban Pemerintah Daerah. Dasar Hukum: Permendagri 77 Tahun 2020	Pergeseran APBD	Pemerintah Kota Pariaman Februari 2024



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
5.	Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	BPKPD	Penyesuaian kegiatan, Pengelolaan dana bagi hasil perkebunan sawit dan memenuhi kebutuhan belajar wajib dan prioritas Dasar Hukum: Permendagri 77 Tahun 2020	Pergeseran APBD	Pemerintah Kota Pariaman Maret 2024
6.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	Bagian Organisasi	Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada ASN di Pemerintah Kota Pariaman Dasar Hukum: PP 14 Tahun 2024	Pengaturan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada ASN di Pemerintah Kota Pariaman	Pemerintahan Kota Pariaman Maret 2024
7.	Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pariaman	Sekretariat DPRD	Kebutuhan pakaian dan beserta kelengkapannya sebagai penunjang kerja bagi Anggota DPRD dan merupakan kebutuhan pokok rutin setiap tahun anggaran Dasar Hukum: PP 18 Tahun 2017	Sarana dan prasarana fasilitasi Pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pariaman.	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pariaman Juni 2024
8.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	BPKPD	Kewajiban pembayaran utang Tahun 2020 s/d 2023 dan pemenuhan belanja wajib dan mengikat Dasar Hukum: Permendagri 77 Tahun 2020	Pergeseran APBD	Pemerintah Kota Pariaman Juni 2024



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
9.	Analisis Standar Belanja dan Harga Pokok Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2025	BPKPD	Kebutuhan Dalam Penyusunan APBD Dasar Hukum: PP 12 Tahun 2020	Standar belanja fisik.	Pemerintah Kota Pariaman Juli 2024
10.	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Dasar Hukum: a. PP 12 Tahun 2019 b. Permendagri 77 Tahun 2020	a. sistem dan prosedur APBD; b. sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan; c. sistem dan prosedur penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran; dan d. sistem dan prosedur laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD	Pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah se-Kota Pariaman Juli 2024
11.	Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman.	UPTD RSUD Dr. Sadikin	RSUD dr.Sadikin Kota Pariaman ingin mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif, dan efisien dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan Perpres 16 Tahun 2018	Tata cara dan tata kelola Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD untuk menjaga efektifitas dan fleksibilitas BLUD	Penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang ditunjuk dan pihak terkait Juli 2024



**WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- 7 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
			<p>dan Permendagri 79 Tahun 2018</p> <p>Dasar Hukum:</p> <p>a. PP 12 Tahun 2019</p> <p>b. Permendagri 79 Tahun 2018</p> <p>c. Permendagri 77 Tahun 2020</p>		
12.	Penguatan Pusat Kesehatan Masyarakat	Dinkes	<p>Prasarana dan sarana Puskesmas memerlukan perawatan dan perbaikan serta peningkatan sehingga kebutuhan tambahan dana salah satunya diperoleh dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional</p> <p>Dasar Hukum: UU 17 Tahun 2023</p>	Upaya peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas	<p>Warga Kota Pariaman, pegawai swasta, petani, buruh, dan ASN</p> <p>Juli 2024</p>
13.	Biaya Masukan Desa Tahun Anggaran 2025	DPMD	<p>Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Dasar Hukum: Permendagri 20 Tahun 2018</p>	Penyusunan APB Desa Tahun 2025 dan standar harga satuan	<p>Tersusunnya Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa</p> <p>September 2024</p>
14.	Alokasi Dana Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025	DPMD	<p>Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Dasar Hukum: Permendagri 20 Tahun 2018</p>	Besaran dan Metode Penyaluran ADD Tahun 2024	<p>Pendapatan pada APB Desa tahun 2024 dan tata cara penyaluran</p> <p>September 2024</p>



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
15.	Penanggulangan Penurunan Kekebalan Tubuh Faktor Infeksi Menular Seksual (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Dinkes	Adanya regulasi pelaksanaan pelaksanaan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> pada kelompok khusus dan kelompok beresiko Dasar Hukum: Permenkes 23 Tahun 2022	Upaya penanggulangan dan tata cara	Dinkes, Lintas sektor, lintas program, masyarakat September 2024
16.	Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama Penyebarluasan Informasi Kota Pariaman dengan Media Massa	Diskominfo	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan dimensi keterbukaan, mudah diakses dan transparan merupakan salah satu perwujudan dari <i>Good Governance</i> yang merupakan jembatan penghubung Pemerintah daerah dengan masyarakat atau publik, perlu pedoman kerja sama penyebarluasan informasi Kota Pariaman dengan media massa di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Dasar Hukum: a. UU 14 Tahun 2008 b. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan c. Permendagri 13 Tahun 2011	Pedoman kerja sama dengan media massa	Media massa cetak, dalam jaringan, dan elektronik September 2024



**WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- 9 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
17.	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2024-2028	Bappeda	Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan target RPJMN Tahun 2020-2024 dan pencapaian TPB/SDGs Dasar Hukum: UU 18 Tahun 2012	Materi Pokok 1. Analisa Situasi 2. Rencana Aksi 3. Pelaksanaan Rencana Aksi 4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Ruang Lingkup Faktor Determinan Pangan dan Gizi Intervensi Gizi Terintegrasi Objek Pengaturan Pangan dan Gizi	Meningkatnya SDM berkualitas berdaya saing dan meningkatnya ketahanan pangan Oktober 2024
18.	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr.Sadikin Kota Pariaman	UPTD RSUD dr. Sadikin	Kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Pariaman. RSUD dr.Sadikin sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat tersebut, sehingga harus memberikan pelayanan yang bermutu sesuai	1. Jenis pelayanan, indikator, nilai, batas waktu pencapaian dan uraian standar pelayanan minimal; 2. Pembinaan dan pengawasan.	Dinkes dan pihak terkait November 2024



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 10 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
			dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Dasar Hukum: a. UU 17 Tahun 2023 b. PP 65 Tahun 2005 c. Permenkes 4 Tahun 2019 d. Permendagri 79 Tahun 2018		
19.	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat	Dinkes	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Dasar Hukum: Permendagri 79 Tahun 2018	Tata cara atau mekanisme	Puskesmas se-Kota Pariaman November 2024
20.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat	Dinkes	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Dasar Hukum: Permendagri 79 Tahun 2018	Tata cara pengadaan dan pemberian remunerasi SDM selain ASN di Puskesmas	Puskesmas se-Kota Pariaman November 2024
21.	Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat	Dinkes	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Dasar Hukum: Permendagri 79 Tahun 2018	Rincian tata cara pengadaan	Puskesmas se- Kota Pariaman November 2024



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 11 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
22.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum	Bagian Organisasi	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Dasar Hukum: Permenhub 27 Tahun 2018	Struktur organisasi dan tata kerja	Dinas Perhubungan dan pihak terkait Desember 2024
23.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Minum	Bagian Organisasi	Perubahan perangkat daerah menjadikan UPTD juga berubah dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Dasar Hukum: PP 122 Tahun 2015	Struktur organisasi dan tata kerja	DPUPRP dan pihak terkait Desember 2024
24.	Dinas Kesehatan	Bagian Organisasi	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyesuaian dan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Dasar Hukum: Permenkes 5 Tahun 2022	Struktur organisasi dan tata kerja	Dinkes dan pihak terkait Desember 2024
25.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Bagian Organisasi	Perubahan yang mengganti Perwako untuk menyesuaikan tugas dan fungsi Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Susunan organisasi dan tata kerja	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta pihak terkait Desember 2024



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 12 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
			agar selaras dengan nomenklatur dan pengelompokan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dasar Hukum: Permendikbud 47 Tahun 2016		
26.	Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bagian Organisasi	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan peta jabatan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja Dasar Hukum: PermenpanRB 1 Tahun 2020	Peta jabatan	ASN Desember 2024
27.	Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bagian Organisasi	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/22/m.sm.01.00/2024 tanggal 8 januari 2024 Dasar Hukum: PermenpanRB 39 Tahun 2013	Kelas jabatan	ASN Desember 2024



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 13 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
28.	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bagian Organisasi	Pengaturan atas penyeragaman dan tertib administrasi dalam tata naskah dinas sangat diperlukan sehingga 1 (satu) pedoman bagi semua ASN dan perangkat daerah Dasar Hukum: Permendagri 1 Tahun 2023	Jenis dan bentuk dokumen hukum dalam penyeleggaraan tata naskah dinas	ASN dan pihak terkait Desember 2024
29.	Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bagian Organisasi	Sebagai instrumen bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada instansi pemerintah daerah dan penyeteraan jabatan dalam rangka paska-penyederhanaan birokrasi Dasar Hukum: Permenpanrb Nomor 7 Tahun 2022	Tata kerja, pelimpahan kewenangan, mandat, pemberian izin tidak masuk kerja, absensi, pelaporan tugas dan fungsi	ASN Desember 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA